

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kampung mempunyai peranan yang sangat penting yang berpengaruh dalam upaya untuk mendorong pembangunan Kampung, pengarahan untuk Masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar maka itu Pemerintah Kampung dapat menjalankan pembangunan dengan sebaik-baiknya dan semestinya bentuk pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di Kampung sehingga pembangunan di Masyarakat kampung dapat terwujud sehingga pembangunan dalam Masyarakat tidak selalu ditentukan dari Keuangan. Tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh perencanaan Aparatur Kampung dan Masyarakat dalam pembangunan Kampung diperlukan Pemimpin yang beribawah, jujur, dan diterima dalam Masyarakat.

Keadaan yang terlihat di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura, yaitu di mana Pemerintah Kampung, dalam hal ini Kepala Kampung Nafri dalam membuat program untuk pembangunan Kampung belum melibatkan seluruh Masyarakat Kampung Nafri untuk bersama-sama menyusun dan mempertimbangkan program pembangunan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat sehingga menimbulkan banyak kekecewaan pada Pemerintah Kampung.

Pada kenyataannya Masyarakat Kampung Nafri mengharapkan agar Pemerintah Kampung dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien,

namun pada kenyataanya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadiah harapan Masyarakat Kampung. Dengan demikian Pemerintah Kampung sebagai pelaksana aturan-aturan dan Pembangunan Kampung dapat di katakan masi kurang menjalankan tugasnya dengan sepenuhnya.

Tetapi ada beberapa pembangunan yang sudah berjalan yang sudah ada berjalan seperti pembangunan Kantor Kampung, pembangunan yang belum berjalan sejak awal terpilihnya bapak Kepala Kampung, tetapi sudah ada pembagaian dana seperti BLT, dan basiswa untuk meseter akhir untuk Mahasiswa, Mahasiswi, Siswa dan Siswi SD, SMP, SMA akan tetapi Pembangunan yang di lakukan hanya baru berjalan di Pembangunan Kantor Kampung sedangkan Masyarakat masi menanti pembangunan lainya seperti Bantuan; Rumah, Air Bersih, Jalan dan ada beberapa lainya yang sedang di nantikan oleh Masyarakat Kampung akan tetapi pembangunan tersebut belum berjalan.

Bantuan atau pembangunan rumah yang di harapkan masyarakat, belum berjalan bangunan rumah ini sangat di perlukana banyaka masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak huni masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni ini sangat mengharapakan pemerintah kampung terutama kepala kampung agar segerah memperhatikan hal ini agar maysrakat dapat merasakan apa itu pembangunan kampung akan tetapi saat ini belum ada pembangunan tersebut, sehingga banyak masyarakat mepertanyakan kinerja aparaturn kampung.

Hal-hal yang seharusnya dilakukan aparat kampung setelah terpilih dan menjalankan tugas mereka, mereka harus mendata rumah rumah non permanen agar dapat mengetahui ada beberapa banyak rumah yang tidak layak huni dan pemerintah kampung atau aparat kampung dan Kepala kampung dapat menentukan dan menghitung jumlah rumah non permanen tersebut sehingga dapat memberikan atau membangun rumah permanen dengan jumlah yang sesuai dari hasil pendataan mereka itu sehingga masyarakat yang memiliki rumah non permanen juga dapat merasakan pembangunan tersebut.

Pembangunan atau bantuan air bersih juga belum terasa dengan baik, walaupun dari kepala kampung sebelum-sebelumnya telah membangun bak air, di mata air akan tetapi masyarakat belum semua merasakan air tersebut di karnakan pipa pipa air tersebut belum sepenuhnya memasuki gang-gang atau wilayah wilayah (rt, rw) yang di tempati oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat yang wilayah-nya belum mendapatkan saluran air dari pipa tersebut harus pergi menadah atau (menimbah air) di kali bukan di mata air bukan ada juga yang pergi ke wilayah rt lain untuk menadah air di situ di karnakan rt dan rw yang lain memiliki pipa air yang dari bak di mata air tersebut sedangkan wilayah rt yang belum menerima air tersebut sudah memintah pada aparat kampung yang dahulu untuk membangun bak dan juga menyambung pipa pipa ke wilayah mereka namun sampai saat ini kepala kampung yang sekarang(baru) belum juga membuat air ke wilayah rt

mereka yang belum merasakan air sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat tersebut apa sebenarnya yang di kerjakan aparatur kampung.

Hal-hal yang seharusnya di lakukan aparatur kampung adalah membuat atau menyambung pipa ke wilayah rt yang belum merasakan air agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Tingkat kesehatan di Kampung Nafri masi sangat berkurang di karna kan di kapung nafri masi belum mempunyai tenaga kesehatan walapun banyak suster bakan dokter, asal nafri hanya saja saat ini tempat untuk para dokter dan suster sudah tidak berfungsi lagi akan tetapi pemerintah kampung dan terutama Kepala kampung belum menjalan kan tempat tersebut, walapun di masa lampau sudah berjalan akan tetapi berhenti di karnakan suster yang berada di tempat atau puskesmas Kampung Nafri telah meninggal dunia sehingga saat ini masyarakat yang sakit harus berjalan beberapa kilo atau beberapa ratus meter untuk mendapatkan perawatan kesehatan hal ini menyebabkan masyarakat yang sakit harus berjalan jauh menggunakan motor atau mobil dengan jarak beberapa ratus meter untuk mendapatkan pengobatan dan di Kampung Nafri tingkat kesehatan yang masi berjalan hanyalah posyandu untuk balita dan anak-anak posyandu ini masi berjalan hingga saat ini.

Hal yang harus pemerintah Kampung Nafri lakukan adalah dengan meningkatkan dan jugah menjalankan puskesmas kampung agar masyarakat Kampung Nafri yang sakit, atau memerlukan pengobatan dapat berobat dengan cepat dan tidak perluh berjalan ratusan meter untuk mendapatkan

pengobatan di karna kan di kampung mereka telah kembali di buka puskesmas kampung yang dapat membantu masyarakat kampung, dan jugah posyandu yang di jalankan jugah sangat membantu masyarakat terutama untuk ibu ibu hamil dan balita hinga bayi yang batru lahir dan jugah anak anak di karna mereka sangat membutuhkan imunisasi dan lain sebaihya.

Tingkat pendidikan di Kampung Nafri sudah ada hanya masi kurang tingkat pendidikan di Kampung Nafri hanyalah sekolah dasar (SD) sekolah dasar ini sedah berjalan hampir 50 atau 60 tahun akan tetapi tingkat pendidikan untuk anak usia dini belum ada seperti tk atau paut karna kita tau pendidikan usia dini sangat penting untuk anak usia dini untuk membentuk karakter anak dan jugah untuk membentuk anak karna anak anak adalah penerus bangsah.

Hal yang harus pemerintah kampung adalah dengan membangun paud dan tk sangat membantu pertumbuhan anak terutama dalam pembentukan karakter anak karna kita tau anak anak adlah penerus bangsa dan jugah akan terlihat perekonomian Kampung Nafri sudah maju akan sampai saat ini belum ada paud atau pun tk walaupun sudah ada sekolah dasar (SD).

Pembangunan jalan sebagaian seudah berjalan tapi ada sebagian yang makrak karna sudah tidak berjalan di karnakan pergantiaan Kepala kampung hal ini yang menyebabkan kan pembangunan sebelumnya mangkrak karna tidak di lanjutkan oleh Kepala kampung yang baru akan tetapi Kepala kampung yang baru telah membuka jalan lain sehingga dapat menciptakan lahan lahan baru untuk pembangunan rumah atau pun perkebunan yang dapat di rasakan

Masyarakat, berjalan dengan pembangunan jalan ini. tetapi jugah ada beberapa tempat atau jalan yang belum berjalan tempat tempat ini belum ada pembangunan jalan nya apa faktor nya dan penyebabnya belum di ketahui, dan jugah pembangunan yang makrak ini adalah pembangunan jalan dari jalan yohanse nafri menuju hol tekam jikalauw jalan ini di lanjutkan dan selesai jalan ini jugah sengat akan membantu pembangunan yang dapat berjalan di sana dan jugah dapat membuat lahan lahan baru untuk perkebunan hal ini jugah akan meningkatkan perekonomian masyarakat karna masyarakat tidak perlu jau jau ke hol untuk menjagah lokasi lokasi pantai mereka yang di sewa oleh para penyewah dan masyarakat dapat dengan cepat membawa hasil perkebunan mereka dengan cepat ke pasar hamadi maupun pasar koya.

Hal-hal yang seharusnya di lakukan aparaturnya dan Kepala kampung baru terpilih harus melanjutkan pekerjaan yang sudah di jalankan Kepala kampung sebelumnya akan tetapi Kepala kampung yang baru ini jugah membuka jalan yang baruh jikalauw jalan yang baru ini tidak selesai setelah masa priode mimpinya akan meninggalkan pekerjaan yang sama seperti Kepala kampung yang lama contoh nya seperti: jalan yang makrak jalan ini tidak di lanjutkan dan di buka jalan yang baru sama saja untuk membuat pekerjaan baru ! tetapi jikalauw Kepala kampung yang baru dan aparaturnya melanjutkan pembangunan jalan yang sebelumnya di kerjakan Kepala kampung yang lama maka masyarakat dapat merasakan satu persatu manfaat dari jalan tersebut di karnakan pembangunan tersebut telah di lanjutkan hingga selesai dan dapat membuat lokasi lokasi pembangunan baru, dan lokasi

perkebunan yang baru setelah itu baru Kepala kampung yang baru dan aparat kampung yang baru membuat jalan yang baru agar dapat membuat lahan yang baru dan jikalau tidak selesai di masa jabatannya dapat di lanjutkan lagi dengan Kepala kampung yang baru dan tidak meninggalkan banyak pekerjaan untuk pempipin kampung berikutnya.

Untuk mencapai tujuan Negara dalam Pembangunan Kampung atau Desa sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintah dan seluruh Masyarakat harus melakukan Pembangunan Nasional di segala bidang mulai dari tingkat Kampung samapai tingkat Pusat Pembangunan itu sendiri dapat di artikan menurut beberapa Ahli sebagai berikut; ‘’suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu.

Dengan demikina Pembangunan sangat penting untuk dilakukan baik secara Sentralisai maupun Desentrilisasi sehinga Pembangunan tidak hanya penting di pusat tetapi jugah dapat di rasakan dan di jalankan di Perkampungan atau Perdesaan Raharjo Adjasamita (2006: 3) menjelaskan bahwa Pembangunan Kampung atau Pedesaan merupakan bagian dari interal dari pembangunan Nasional, sebagai usaha peningkatan kualitas sumber daya Manusia atau lebih di kenal dengan istila (SDM) sumber daya ini akan meningkatkan Pembangunan Desa dan Manusianya dan bersifat berkelanjutan berdasarkan perstasi Pemerintahan Desa atau Kampung yang memicu ke arah Pembangunan yang maju dalam Masyarakat yang mandiri, maju, sejatera dan berkeadilan.

Dengan demikian Pembangunan Kampung dapat berjalan sesuai dengan harapan Masyarakat Kampung maka Pemerintah Kampung harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Masyarakat dapat puas dengan kinerja Aparatur Kampung yang berjalan dengan baik sehingga akan banyak Masyarakat Kampung dan bahkan seluruh Masyarakat Kampung dapat berpartisipasi dalam pembangunan Kampung sehingga pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Kampung dan juga Pemerintah Kampung.

B. Perumusan Masalah dan Pembahasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana peranan Kepala Kampung Nafri dalam pembangunan Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura Papua ?

2. Pembahasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal dalam peranan pembangunan dalam pembangunan Kampung Nafri dalam peranan Kepala kampung terhadap pembangunan kampung permasalahan atau pembatasan masalah ini adalah

- a. Pembatasan yang terjadi dikarenakan kurangnya keaktifan dalam kantor Kampung Nafri
- b. Kurangnya perhatian oleh aparat kampung dan Kepala kampung terhadap penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini

- c. Batasan yang dilakukan Kepala kampung dalam mengambil data.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian sangat diperlukan agar mengetahui peranan Kepala kampung dalam pembangunan Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura apakah Kepala kampung sudah menjalankan pembangunan dengan semestinya berikut ini apasaja tujuan penelitian :

- a. untuk mengetahui peranan Pemerintah Kampung Nafri dalam menyusun perencanaan pembangunan Kampung.
- b. Untuk mengetahui pembangunan apa saja yang sudah berjalan dan yang belum berjalan dan yang masih atau sedang berjalan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan mengetahui pengetahuan baru tentang pembangunan Kampung Nafri melalui peranan kepala Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura dalam pembangunan Kampung Nafri berikut ini apa saja manfaat dari penelitian ini :

- a. dapat memecahkan masalah penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kampung khususnya mengenai suatu perencanaan pembangunan Kampung.

D. Teori Peranan (Konsep Peranan Pembangunan)

Teori perencanaan pembangunan yang mengacu pada arti dan makna raingkain karakteritis kinerja Pemerintah di gunakan oleh akademis politik dan polotisi dalam menganalisa nilai keberhasilan atau kegagalan fungsi dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan. Kata peranan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tindakan yang di lakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soekanto (2003) peranaan adalah aspek dinamamis kedudukan (status) apabila Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan nya makah dia menjalankan suatu peranan. setiap Orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. hal ini sekaligus berarti bahwa perenan menentukan apa yang di buat nya bagi Masyarakat peranan-peranan apa yang di berikan pada Masyarakat yaitu mencakup tiga hal:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat Seseorang dalam Masyarakat, Sesorang dalam Kehidupan Masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh Individu dalam Masyrakat dan dalam Organisasi.
- c) Peranan jugah dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi stuktur sosial Masyarakat.

E. Devinisi Pemerintah Kampung (Devinisi Kampung)

1. Pengertin kepemimpinan

Berdasarkan urain di atas maka peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan yang dimainkan oleh Seseorang sesuai aturan main, cara, poreses, perbuatan perbuatan yang di harapkan menurut kedudukan dalam Masyarakat. dengan konsep peranan ini tugas utama kedudukan Seseorang dapat di ukur sebagaimana tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Dalam penelitian ini konsep peranan yang di gunakan dalam mendeskripsikan Pemerintah Kampung dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan Kampung

Menurut undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kampung atau yang di sebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan suku-suku dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional Kampung (Desa) memang adalah peranan yang sangat penting sebab Kampung merupakan stuktur Pemerintah terendah dari sistem Pemerintahan Indonesia setiap jenis kebijakan pembangunan Nasional pasti bermula pada Pembangunan Kampung atau lebih di kenal sebagai budaya perkembangan Kampung

yang bersangkutan dengan fungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung seperti pembuatan peraturan Kampung, anggaran Kampung dan pendapatan belanja, pembangunan Kampung dan keputusan Kepala Kampung di kampung jugah di bentuk lembaga Kemasyarakatan yang Berkependudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung dalam memperdayakan Masyarakat Kampung.

Pemerintah kampung terdiri dari kepala kampung dan Perangkat kampung terdiri dari Sekertaris Kampung, Bendahara Kampung, pelaksana teksinisi lapangan seperti Rt, Rw, Polmas, dan lain-lainya yang di sesuaikan sesuai kondisi Kampung dan kondisi sosial budaya Masyrakat, dan Perangkat Kampung seperti Serkertaris di isi dengan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Dalam PP no 73 Tahun 2005 pasal 15 dan 14 di sebutkan bahwa Kepala Kampung mempunyai tugas penyelenggaraan dalam menyelenggarakan unsur Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan unsur Pemerintah yang di maksud adalah pengaturan Kehidupana Masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kampung seperti paraturan Kampung, pembentukan lembaga Kemasyarakatan pembentukan badan usaha milik Kampung, dan kerja sama antara Kampung dalam pembangunan Kepala Kampung mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mempin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdesakan kebijakan yang di tetapkan bersama BPK (badan pengurus kampung)
- b. Melanjutkan rencana Pembangunan Kampung.

- c. Menetapkan peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BPK
- d. Menyusun dan mengajukan peraturan Kampung mengenai APBK untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPK.
- e. Membina kehidupan Masyarakat Kampung.
- f. Membinakan perekonomian Kampung.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara pesititatif.
- h. Mengwakili Kampung nya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menjuk kuasa Hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain-lain sesuai Perundang-Undangan dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, Kepala Kampung mempunyai kewajiban. Memegang teguh Pancasila melaksanakan undang undang dasar Repoblik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan kan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.
- j. Memelihara ketertiban dan ketenraman Masyarakat.
- k. Melaksanakan kehidupan Demokrasi.
- l. Melaksanakan prinsip tatah Pemerintahan Kampung yang bebas dan bersi dari kolusi korupsi dan dan nepotisme (KKN).
- m. Menjalin Kerja dengan seluruh mitra kerja Kampung.
- n. Menjalakan Adminstarasi Kampung dengan baik.
- o. Melaksanakan dan mempertanggung jawab kan pengelolaan ke uangan Kampung.
- p. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang Kampung.

- q. Mendamaikan perselihsian Masyarakat.
- r. Mengembangkan pendapat Masyarakat Kampung.
- s. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- t. Memsumberdayakan Masyarakat dan kelembagaan di Kampung Meningkatkan kesejatron masyarakat.
- u. Melaksanakan pembangunan Kampung.
- v. Mengembakan pontensi sember daya alam dan melestarikan Lingkungan Hidup selain kewajiban yang di maksud di atas.

Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta mengofirmasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung kepada masyarakat, laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung ini di sampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun laporan keterangan penangung jawaban kepada BPD sebagai mana di atas di sampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawara BPD sedang kan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung kepada Masyarakat bisa berupa selebaran yang di tempelkan di papam pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam pertemuan Masyarakat Kampung, Radio, Komonitas atau media lainnya.

Perangkat Kampung sebagai mana di maksud dalam pasal 12 ayat 1 PP No. 72 tahun 2005 yaitu Sekertaris Kampung yang bertugas

membantu Kepala Kampung dalam tugas dan wewenang nya. Dalam melaksanakan tugas nya, Sekertasi Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung Sekertasi Kampung di isi dari pegawai Negri sipil yang di angkat oleh Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota atas Nama Bupati / Walikota yang memenuhi syarat yaitu:

- a. Paling rendah berpendidikan SMA/SMU Sederajat
- b. Berpengetahuan tentang teknis Pemerintahan
- c. Mempunyai kemampuan dalam Administrasi Perkantoran
- d. Mempunyai pengalaman dalam bidang ke uangan dan bidang perencanaan pembangunan
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
- f. Bersedia tinggal di desa bersangkutan

Sedangkan perangkat Kampung lainnya di angkat oleh Kepala kampung dari Penduduk kampung. Pengangkatan Perangkat Kampung dan usia Perangkat Kampung itu paling rendah 20 tahun-peling tinggi 60 tahun mengenai peraturan Kampung lain di atur oleh peraturan Daerah Kota atau Kabupaten

2. Penegertian Kampung

Kampung atau desa adalah sekelompok warga yang memiliki tempat atau wilayah adat yang memiliki pemimpin yang di pilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan atau pemungutan suara dan kampung di pipin oleh Kepala kampung dan menurut para ahli seperti koentjaraningrat (1990), menjelaskan bahwa kampung adalah kesatuan

masyarakat yang memiliki empat ciri yaitu intraksi antara warga, adat istiadat, norma-norma dan aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku masyarakatnya.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

R. Bintarto (2010:6) menyatakan kampung juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.

N. Daldjoeni (2011:4) kampung dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

H. A. W. Widjaja (2009:3) kampung adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sejajar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan kampung atau desa adalah : kampung adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa atau kampung menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan kampung sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain kampung, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12)

Sedangkan pengertian desa atau kampung menurut UU Nomor 6 tahun 2014, kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang kampung yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan kampung. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada kampung, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan urusan Pemerintahan lainnya

akan di serakan pada pemerintah kampung menurut Peraturan perundang-undangan.

F. Teori Pembanguna Kampung

1. Pengelolaan Pembangunan Kampung Nafri

Elemen-Elemen pembangunan kampung dalam teori perencanaan pembangunan Kampung Nafri, meliputi komposisi dan kepadatan penduduk kampung, sertifikasi masyarakat kampung, bentuk-bentuk kebudayaan masyarakat kampung, pertumbuhan ekonomi kampung dan masyarakat kampung, tingkat pendidikan masyarakat kampung, tingkat kesehatan masyarakat kampung dan kesejahteraan masyarakat kampung serta kesejahteraan hukum dan administrasi masyarakat kampung dan kampung.

G. Indikator Pembangunan Kampung

Pembangunan kampung merupakan seluruh rangkaian usaha yang dilakukan di lingkungan kampung yang memiliki tujuan utama untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung, dan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat kampung dengan perencanaan yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat kampung seperti juga ciri-ciri ekonomi konvensional. Pembangunan kampung menjadi sebuah hal yang penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara. kampung sebagai

struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian negari yang kuat.

Kampung yang berhasil membangun seluruh aspek kehidupannya akan mampu bersaing bahkan dengan masyarakat perkotaan sekalipun. Jika dulu masyarakat kampung selalu indentik dengan kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya informasi dan dikenal kampungan. Zaman dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, jika anda pergi ke kota mungkin anda akan di bully karena terkesan kampungan. Paradigma inilah yang kemudian ingin dihapus melalui keberhasilan pembangunan kampung seperti ciri-ciri ekonomi pancasila. Nyatanya saat ini, masyarakat kampung malah mampu berperan aktif dalam membangun perekonomian negara melalui kegiatan usaha baik di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Kampung merupakan sebuah wilayah dimana masih terdapat sumber daya alam yang masih melimpah seperti dalam kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi syariah. Namun, tentunya

H. Devinisi Pemerintah Kampung

Menurut undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kampung atau yang di sebut dengan nama lain, Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan suku-suku dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional Kampung (Desa) memang adalah peranan yang sangat penting sebab Kampung merupakan struktur Pemerintah terendah dari sistem Pemerintahan Indonesia setiap jenis kebijakan pembangunan Nasional pasti bermula pada Pembangunan Kampung atau lebih di kenal sebagai budaya perkembangan Kampung yang bersangkutan dengan fungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung seperti pembuatan peraturan Kampung, anggaran Kampung dan pendapatan belanja, pembangunan Kampung dan keputusan Kepala Kampung di kampung jugah di bentuk lembaga Kemasyarakatan yang Berkependudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Kampung dalam memperdayakan Masyarakat Kampung.

Pemerintah kampung terdiri dari kepala kampung dan Perangkat kampung terdiri dari Sekertaris Kampung, Bendahara Kampung, pelaksana teknis ini lapangan seperti Rt, Rw, Polmas, dan lain-lainya yang di sesuaikan sesuai kondisi Kampung dan kondisi sosial budaya Masyarakat, dan Perangkat Kampung seperti Serkertaris di isi dengan Pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat.

Dalam PP no 73 Tahun 2005 pasal 15 dan 14 di sebutkan bahwa Kepala Kampung mempunyai tugas penyelenggaraan dalam menyelenggarakan unsur Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan unsur Pemerintah yang di maksud adalah pengaturan Kehidupana Masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kampung seperti paraturan Kampung, pembentukan lembaga Kemasyarakatan pembentukan badan usaha milik Kampung, dan kerja sama

antara Kampung dalam pembangunan Kepala Kampung mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mempin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdesakan kebijakan yang di tetapkan bersama BPK (badan pengurus kampung)
- b. Melanjutkan rencana Pembangunan Kampung.
- c. Menetapkan peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BPK
- d. Menyusun dan mengajukan peraturan Kampung mengenai APBK untuk di bahas dan di tetap kan bersama BPK.
- e. Membina kehidupan Masyarakat Kampung.
- f. Membinana perekonomian Kampung.
- g. Mengkordinasikan pembangunan Kampung secara pesitifatif.
- h. Mengwakili Kampung nya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menjuk kuasa Hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain-lain sesuai Perundang-Undangan dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, Kepala Kampung mempunyai kewajiban. Memegang teguh Pancasila melaksanakan undang undang dasar Repoblik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan kan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia.
- j. Memelihara ketertiban dan ketenraman Masyarakat.
- k. Melaksanakan kehidupan Demokrasi.
- l. Melaksanakan prinsip tatah Pemerintahan Kampung yang bebas dan bersi dari kolusi korupsi dan dan nepotisme (KKN).

- m. Menjalin Kerja dengan seluruh mitra kerja Kampung.
- n. Menjalankan Adminstarasi Kampung dengan baik.
- o. Melaksanakan dan mempertanggung jawab kan pengelolaan ke uangan Kampung.
- p. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang Kampung.
- q. Mendamaikan perselihsian Masyarakat.
- r. Mengembangkan pendapat Masyarakat Kampung.
- s. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- t. Memsumberdayakan Masyarakat dan kelembagaan di Kampung Meningkatkan kesejatron masyarakat.
- u. Melaksanakan pembangunan Kampung.
- v. Mengembakan pontensi sember daya alam dan melestarikan Lingkungan Hidup selain kewajiban yang di maksud di atas.

Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta mengofirmasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung kepada masyarakat, laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung ini di sampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat 1 kali dalam satu tahun laporan keterangan penangung jawaban kepada BPD sebagai mana di atas di sampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawara BPD sedang kan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kampung kepada Masyarakat bisa berupa

selembaran yang di tempelkan di papam pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam pertemuan Masyarakat Kampung, Radio, Komonitas atau media lainnya.

Perangkat Kampung sebagai mana di maksud dalam pasal 12 ayat 1 PP No. 72 tahun 2005 yaitu Sekertaris Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam tugas dan wewenang nya. Dalam melaksanakan tugas nya, Sekertasi Kampung bertanggung jawab kepada Kepala Kampung Sekertasi Kampung di isi dari pegawai Negri sipil yang di angkat oleh Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota atas Nama Bupati / Walikota yang memenuhi syarat yaitu:

- a. Paling rendah berpendidikan SMA/SMU Sederajat
- b. Berpengetahuan tentang teknis Pemerintahan
- c. Mempunyai kemampuan dalam Administrasi Perkantoran
- d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan dan bidang perencanaan pembangunan
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
- f. Bersedia tinggal di desa bersangkutan

Sedang kan perangkat Kampung lainnya di angkat oleh Kepala kampung dari Penduduk kampung. Pengangkatan Perangkat Kampung dan usia Perangkat Kampung itu paling rendah 20 tahun-peling tinggi 60 tahun mengenai peraturan Kampung lain di atur oleh peraturan Daerah Kota atau Kabupaten.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan dan tempat tertentu secara rinci dan mendalam untuk bentuk narasi (Djamar satori 2011).

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peranan Pemerintah Kampung dalam pembangunan Kampung di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang di kumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai objek penelitian. Jenis dalam dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

- a.** Data primer data primer di peroleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b.** Data sekunder yaitu berupa tulisan dan rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik semua yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah teknik yang di gunakan dalam hal mengumpulkan data penelitian dan teknik penelitian terdiri dari beberapa teknik untuk mendapat informasi agar seseorang yang meneliti dapat mendapat data yang akurat dan tepat dan mudah berikut ini teknik penelitian yang terbagi menjadi 4 bagian:

a. Teknik Mendapat Informan

Pemilihan informan di lakukan secara (*purposive sampling*) teknik ini di gunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian infromasi yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat di percaya untuk menjadi sumber data. Dengan demikian informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung, ketua badan Pemursyawaratan Kampung (basmuskam), sekertaris kampung dan masyarakat kampung.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informas yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

c. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh empat pihak yaitu Pewancawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan peralatan praktikum.

d. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

e. Teknik dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

a. Teknik Analisis Data kualitatif (Miles dan Huberman)

Analisis data adalah proses mencari menyusun data secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data:

1. Reduksi Data

Data yang di teliti dan di peroleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok fokusnya pada hal-hal yang penting yang di cari menurut temah dan polah nya. Dengan demikian data telah di reduksi dan akan memberi gambaran yang sangat jelas dan membudakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mudah mencarinya bilah di perlukan dalam meperediksi data, setiap penelitian di pandu oleh tujuan yang di capai tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Dalam penelitian ini reduksi data di lakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari Pemerintahan Kampung Nafri, Aparatur Kampung, Masyarakat Kampung Nafri dan sebagai penulis menyerderhanakan data-data dengan mengambil data-data yang mendukung penelitian ini. sehinga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat di pertangung jawabkan.

2. Penyajian Data

Setelah data yang di kumpulkan direduksi, maka langka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara katagori, flowchart dan sejenisnya. dalam hal ini miles dan huberman yang paling sering di gunakan untuk menajikan data dalam

penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. selanjutnya di sarankan dalam melakukan *display data*, salinan teks yang naratif jugah dapat *berubah grafik, matrik, network* (jaringan kerja) dan *chart*.

Dalam menyajikan data penelitian ini mendeskripsikan data-data tentang peranan Pemerintah Kampung Nafri dalam pembangunan Kampung Nafri sehingga permasalahan jalan dan tidak nya pembangunan yang di lakukan Pemerintahan Kampung.

3. Penarik Kesimpulan

Langka terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga interaktif, hipotesis atau teori.